BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
SUB BAGIAN HUMAS DAN TATA USAHA KALAN

KLIPING MEDIA 2022

KEPAHIANG

RABU, 09 FEBRUARI 2022

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU		.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

[ ] POSITIF [x] NETRAL [ ] BAHAN PEMERIKSAAN [ ] PERHATIAN KHUSUS

Pencairan Banpol Terancam Pending

ZAIDAN JAUHARI

KEPAHIANG – Semua partai politik (Parpol) di Kabupaten Kepahiang telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana Bantuan Parpol (Banpol) tahun anggaran 2021. Namun hal itu belum bisa memastikan apakah 10 parpol tersebut bisa kembali mendapatkan Banpol tahun 2022 ini.

Pasalnya, salah satu syarat dari pencairan Banpol 2022 adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Bengkulu terhadap SPj dari seluruh parpol. Bila ada temuan BPK terhadap penggunaan Banpol oleh masing-masing parpol, otomatis dana Banpol tahun 2022 ditunda (pending) pencairannya.

Dikemukakan Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kepahiang, Zaidan Jauhari, S.Pd, pihaknya tinggal menunggu surat dari BPK RI perwakilan Bengkulu. Juga Inspektorat daerah (Ipda) Kepahiang untuk pelaksanaan audit.

Ketika surat atau pemberitahuan diterima pihaknya, selanjutnya SPj akan diserahkan ke BPK untuk segera dilakukan audit. "Kita hanya menunggu pemberitahuan. Untuk sementara, SPj Parpol atas realisasi keuangan tahun 2021 seluruhnya telah kita terima," kata Zaidan.

Ketika sudah dilakukan audit, dan tidak ditemukan catatan untuk dilakukan perbaikan, Zaidan memastikan proses pencairan Banpol sudah bisa dilakukan. Untuk diketahui, tahun ini dana Banpol Kabupaten Kepahiang mengalami kenaikan menjadi Rp 15 ribu per satu suara sah.

"Mulai 2022 ini 10 Parpol akan mendapatkan anggaran lebih dari sebelumnya. Tahun sebelumnya 1 suara sah hanya Rp 11.313, tahun ini menjadi Rp 15 ribu. Kita berharap seluruh SPj yang disampaikan Parpol tidak ada rekomendasi BPK yang sifatnya harus melakukan perbaikan. Jika ada perbaikan sudah barang tentu itu menjadi temuan BPK, sehingga sebelum perbaikan diselesaikan maka pencairan Banpol ditunda," demikian Zaidan.

Untuk diketahui, di 2021 lalu 10 Parpol di Kepahiang yang mendapatkan dana Banpol, yakni Nasdem Rp 214.539.732, Golkar Rp 125.008.650, PKB Rp 104.837.571, Demokrat Rp 99.475.209, PDI P Rp 83.286.306, Hanura Rp 65.513.583, Gerindra Rp 63.420.678, PKS Rp 51.021.630, Perindo Rp 45.636.642 dan PPP Rp 45.534.825. **(sly)**